

BAB VI

PRAKTEK POLITIK MIGRAN MUSLIM DI TANAH PAPUA

Diskusi pada bab ini melihat relasi antara migran dan Orang Asli Papua dalam dinamika otonomi khusus Papua yang telah berlangsung sejak lama. Pada bidang politik, otonomi khusus Papua membawa Orang Asli Papua menjadi resistens dan protektif terhadap migran dalam posisi-posisi politik, baik di legislatif maupun di eksekutif sehingga migran selalu ditempatkan pada posisi subordinat. Namun dalam hubungan dengan migran Orang Asli Papua melihat kaum migran mempunyai modal politik yang besar untuk ikut dalam agenda politik lokal yang dilihat sebagai oleh pihak migran sebagai bentuk afirmasi politik terhadap Orang Asli Papua yang telah melahirkan relasi politik dengan migran dengan bentuk politik kontestatif afirmatif. Pihak migran muslim berusaha selalu menyiapkan sumber daya dalam politik baik di birokrasi pemerintahan maupun di legislatif untuk mengalokasikan sumber daya yang siap setiap waktu sebagai bentuk representasi politik migran di Papua.

6.1 Siasat Politik Birokrasi

Seperti halnya kegaduhan dalam aspek ekonomi di atas, keadaan yang sama juga terjadi dalam kehidupan politik masyarakat yang selalu mendasarkan asumsi tindakan dan pikiran pada undang-undang otonomi khusus Papua, menempatkan kontestasi posisi yang seharusnya menganut proposisi *the right place for the right person* harus diabaikan oleh jargon afirmatif *the right place for indigenous Papuan*, memberi akses terhadap berbagai kebijakan politik yang tidak cukup menggembirakan dan yang berdampak langsung bagi publik. Penempatan individu pada posisi penting baik di eksekutif maupun legislatif lebih mengedepankan semangat kedaerahan dan terkadang mengabaikan proses jenjang dan kepangkatan yang harus dilewati

oleh seseorang yang menjadi syarat mutlak dalam pengisian posisi formal dalam struktur pemerintahan.

Semangat otonomi daerah telah membangkitkan gelora orang daerah untuk menjadi tuan di negeri sendiri. Otonomi khusus Papua merupakan point yang dipahami oleh Orang Asli Papua untuk dapat menduduki posisi-posisi yang dianggap strategis. Posisi pada jabatan gubernur misalnya yang secara eksplisit menunjukkan bahwa Gubernur di Papua mensyaratkan harus Orang Asli Papua sebagaimana pada Undang-Undang Otonomi Khusus Papua Nomor 21 Tahun 2001 Pasal 12 (a) yang berbunyi “yang dapat dipilih menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur adalah Warga Negara Republik Indonesia dengan syarat “Orang Asli Papua”. Lalu kemudian persyaratan tersebut diperkuat dengan keharusan adanya rekomendasi berupa pertimbangan dan persetujuan dari satu lembaga kekhususan Papua yang bernama Majelis Rakyat Papua (MRP) pada Pasal 20 Ayat 1 (a) yang berbunyi: “memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur.”

Demikian pula pada posisi jabatan Bupati/Walikota, hampir tidak ada orang migran yang masuk menjadi orang nomor satu di ajang kontestasi pimpinan daerah setingkat Bupati/Walikota. Euforia semangat kedaerahan untuk menjadi tuan di negeri sendiri dan diklaim sebagai hak Orang Asli Papua untuk menguasai jabatan-jabatan tersebut. Majelis Rakyat Papua (MRP) sebagai lembaga representasi kultural Orang Asli Papua bersama Gubernur Papua baik secara implisit maupun eksplisit dalam berbagai kesempatan pernah meminta kepada kaum migran untuk tidak menjadi kepala daerah di Papua. Dalam kasus pemilukada di salah satu kabupaten di Papua misalnya, salah satu kandidat “AM” yang kebetulan adalah seorang migran muslim menang pada putaran pertama dan ada potensi untuk menang pada putaran kedua mendapat sorotan dari Gubernur Papua, Lukas Enembe dengan mengatakan “*ada pendaatang yang maju pilkada di Kabupaten Mimika mestinya hargailah kami orang Papua, Bupati harus Orang Asli Papua, kalau wakil bolehlah*”

([http://www. Papua Pos Online surat kabar harian, \[31/07/2013\]](http://www.Papua Pos Online surat kabar harian, [31/07/2013])). Tentu dalam kasus ini, migran secara jelas tidak dapat masuk ke wilayah tersebut karena ada resistensi dari Orang Asli Papua.

Konsekuensi dari penguasaan pada pemerintahan tingkat provinsi dan kabupaten/kota oleh Orang Asli Papua berdampak pula pada posisi jabatan kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sampai pada level jabatan ke bawah yang pada waktu tertentu mengabaikan aspek persyaratan dan kompetensi yang semestinya dimiliki dilalui oleh seorang pejabat dalam rangka proses menduduki suatu jabatan tertentu. Contoh kasus terjadi pada tahun 2014 di salah satu pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pemerintah Kabupaten Jayapura yang dipimpin oleh Orang Asli Papua yang sebenarnya belum memenuhi syarat kepangkatan yang seharusnya. Tetapi karena alasan afirmasi, seorang kepala daerah dapat mendudukkan seorang pejabat “anak adat” untuk diberi posisi agar merasa tuan di negeri sendiri dan merasakan hak keistimewaan otonomi khusus. Dikarenakan soal persyaratan yang belum terpenuhi disiasatilah untuk sementara waktu ditunjuk sebagai Pejabat Pelaksana Tugas (PLT) sambil menunggu sampai jenjang kepangkatan tersebut dinyatakan terpenuhi dan dapat di ditetapkan sebagai pejabat defenitif. Berikut data pejabat struktural di pemerintahan Kabupaten Jayapura.

Tabel. 6.1
Data Jabatan Eselon I,II,III,IV PEMDA
Kabupaten Jayapura, Tahun 2018

NO	KATEGORI	ESELON											
		II a	%	II b	%	III a	%	III b	%	IV a	%	IV b	%
1	Migran Muslim			9	29,03	15	25,86	22	19,47	111	27,89	9	20,93
2	Papua			19	61,29	27	46,55	52	46,02	239	60,05	28	65,12
3	Lain Lain	1	100,00	3	9,68	16	27,59	39	34,51	48	12,06	6	13,95
JUMLAH		1		31		58		113		398		43	

Sumber : Data diolah penulis dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM, Kabupaten Jayapura, Tahun 2018

Hal yang sama terjadi pada kasus penentuan jabatan kepala sekolah di suatu tempat di wilayah Kabupaten Jayapura yang secara nyata menekan yang lain untuk tidak memberikan posisi jabatan selain kepada Orang Asli Papua. Proses afirmasi terhadap Orang Asli Papua terutama bagi mereka putra asli Tanah Tabi secara langsung mengelompokkan para aparatur sipil pemerintahan dalam dua kelompok besar berdasarkan etnis, bukan lagi berdasarkan pada kemampuan sumberdaya, terutama pada posisi-posisi strategis sebagaimana yang diutarakan oleh bapak “A” yang merupakan tokoh Politisi migran sebagai berikut.

“...ada kepala sekolah yg baru golongan III, terus dia juga masih junior, tapi karena merasa dia putra daerah...ini salah satu contoh, blm lagi di birokrasi kabupataen, itu yang namanya kabinetnya bupati itu hampir 100% orang Papua, putra daerah...”¹

Fakta-fakta tersebut di atas menjadi bukti bahwa memang telah terjadi pengistimewaan Orang Asli Papua dalam posisi birokrasi yang akibatnya melahirkan dominasi. Kondisi ini diperkuat

¹ Hasil wawancara dengan bapak “A”, pada hari Selasa Tanggal 18 Juli 2017

dengan apa yang dikemukakan oleh bapak “B” sebagai tokoh migran dari Paguyuban Madura berikut :

“...kalau masalah katakanlah pendatang di pemerintahan tetap saja seorang pendatang tidak mudah, ini setelah ada otsus ini..., jadi untuk masalah mau jadi PNSkah, atau bagaimana, yang namanya pendatang sampai detik ini, tidak serta merta apa yang dilihat semudah itu...”²

Bagi masyarakat migran yang ada dalam pemerintahan, kondisi ini dilihat sebagai kenyataan yang harus diterima akibat kebijakan otonomi khusus, namun bukan berarti menerimanya dengan pasrah begitu saja, tetapi migran bersiasat untuk tetap eksis dan bekerja dengan loyalitas serta komitmen yang baik terhadap tugas dan tanggungjawab sebagai aparat sipil negara. Migran merespon kondisi tersebut dengan tanpa konfrontasi. Mereka berusaha menahan diri dan menyadari, mengalah dan memberikan ruang yang banyak kepada orang Papua.

Penempatan pejabat dalam birokrasi terpola kepada adanya prioritas terlebih dahulu kepada Orang Asli Papua setelah itu kepada yang lain yaitu migran non Papua, lalu kepada migran muslim. Bahkan pembagian tersebut dipolakan berdasarkan pada agama sebagaimana yang telah dijelaskan, yaitu pejabat Orang Asli Papua kristen, lalu pejabat migran kristen, kemudian pejabat Islam dan Orang Asli Papua yang Islam dan terakhir adalah migran Islam sebagaimana yang disebut oleh Rumberu (2018), terjadinya pengklasifikasian warga masyarakat dalam mendapatkan akses termasuk dalam pemerintahan lokal Papua. Dari gambaran politik birokrasi yang terjadi di Kabupaten Jayapura menegaskan adanya pengistimewaan terhadap Orang Asli Papua dalam birokrasi pemerintahan seperti halnya terjadi di Kota Jayapura yang dijelaskan oleh Iribaram, (2018) bahwa penentuan posisi-posisi pemerintahan di Papua didasarkan pada atau dipengaruhi oleh kesamaan identitas primordial etnis dan agama.

² Hasil wawancara dengan “B”, hari Rabu Tanggal 27 September 2017

Di wilayah legislatif, undang-undang otonomi khusus Papua mewajibkan kepada Partai Politik untuk merekrut anggota partai yang memprioritaskan kepada Orang Asli Papua, pada pasal 28 ayat 3 yang menyatakan bahwa “Rekrutmen politik oleh partai politik di Provinsi Papua dilakukan dengan memprioritaskan masyarakat asli Papua”. Afirmasi perpolitikan lokal Papua bagi orang asli diikuti dengan kesadaran mereka memasuki berbagai partai politik yang ada. Akibatnya posisi dan peran migran tidak banyak terlihat pada wilayah ini karena merasa sadar diri tidak pada posisi untuk tampil dan terbuka berpartisipasi di ranah perpolitikan, kecuali hanya sebagai anggota biasa. Kebijakan ini telah membuat dua kelompok menjadi salah satunya ordinat dan yang lainnya subordinat yang pada akhirnya melahirkan dominasi politik.

Tekanan terhadap migran dalam kehidupan politik dapat terlihat pada kasus pemilihan kepala daerah tahun 2006-2011, saat calon bupati petahana Habel Melkias Suwae mencoba mencari calon pendamping sebagai wakil bupati Jayapura sempat mengemuka calon dari unsur migran Muslim yang dianggap dapat meraup suara pemilih migran, yaitu antara Rahman Idris (Bugis-Makassar) dan Sulaiman Hamzah (Nusa Tenggara Timur), bahkan nama calon yang terakhir dinyatakan sudah sempat melakukan pembicaraan dengan petahana, namun karena adanya tekanan dari masyarakat adat Jayapura untuk tidak ikut mengambil bagian dalam kontekstasi pemilihan kepala daerah, maka Habel Melkias Suwae terpaksa harus mengambil pasangan dari unsur Orang Asli Papua, Zadrak Wamebu sambil tetap berkomunikasi dengan baik kepada para ketua-ketua paguyuban migran seperti Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan (KKSS) dan Himpunan Keluarga Jawa Madura (HKJM) dan lainnya sampai hasilnya beliau dapat memenangkan dengan telak.

Demikian pula kasus Yanni, seorang politisi perempuan migran Muslim yang mencoba maju dalam pemilihan kepala daerah periode 2017-2022, berpasangan dengan Zadrak Afasedenya, ketika dalam proses pemilihan berjalan kandidat

sempat mendapat reaksi dari masyarakat adat Sentani dengan penolakan untuk menjadi pemimpin di Tanah Tabi (Jayapura) dengan alasan adat istiadat dan budaya yang tidak memperbolehkan seorang perempuan menjadi pemimpin, hal ini merupakan wilayah laki-laki. Seorang demonstran bernama Opra Nari menyuarakan, “Yanni bukan perempuan asli Papua (Tabi), Budaya dan adat kami mengatur dengan jelas bahwa seorang pemimpin hanya bisa didaulatkan kepada kaum laki-laki” (Tabloidjubi.com “Perempuan Tabi demo Tolak Yani di Pilkada Jayapura”, 23 Sempتمبر 2016). Adanya tekanan seperti ini bagi kandidat tidak menurunkan hasrat untuk tetap maju dalam Pilkada dan tekanan tersebut cenderung mengabaikan pasangan kandidat lain serta tidak konsisten, karena di saat yang sama ada pasangan yang berasal dari unsur perempuan yang semestinya secara adat dan budaya juga tidak boleh maju, namun karena berasal unsur perempuan asli Papua. Hasilnya kandidat Yanni bersama pasangan Zadrak Afasedenya tidak meraih suara signifikan dan kalah dalam pilkada tersebut, ditengarai penyebab kekalahan karena suara migran terpecah dalam dukungan kepada tiga pasangan kandidat yang ada.

Dominasi Orang Asli Papua juga terlihat pada dua hasil pemilu terkahir. Terlihat posisi jabatan yang di legislatif misalnya memperlihatkan posisi Orang Asli Papua lebih dominan dari migran Muslim dalam pemilihan anggota pada pemilu tahun 2014 – 2019 dan hasil pemilu periode tahun 2009-2014, juga memperlihatkan Orang Asli Papua melebihi migran Muslim mendapatkan jatah di legislatif Kabupaten Jayapura.

Tabel. 6.2
Daftar Anggota Legislatif Hasil Pemilu
Tahun 2009-2014

NO	NAMA	PARTAI	ETNIS/AGAMA
1	YOHANES ELUAY, SH	GOLKAR	PAPUA-KRISTEN
2	DRS. NURDIN FAISAL	GOLKAR	MIGRAN-ISLAM
3	FREDI KAWAY	GOLKAR	PAPUA-KRISTEN
4	YOHANES LENSRU	GOLKAR	PAPUA-KRISTEN
5	ISAIAS MARA, SH	PDIP	PAPUA-KRISTEN
6	KORNELES YANUARING	PDIP	PAPUA-KRISTEN
7	YOSAFAT ENTHONG,STH	PDIP	PAPUA-KRISTEN
8	MELKIAS DEREK OFEDE,SH	DEMOKRAT	PAPUA-KRISTEN
9	DRS. GEDION DODOP,MM	DEMOKRAT	PAPUA-KRISTEN
10	YAFET APASERAY	PKB	PAPUA-KRISTEN
11	AMIR HAMZAH	PKB	MIGRAN-ISLAM
12	STENLY JEMS TEWAL,A.md	PDS	MIGRAN-KRISTEN
13	AMOS JIKWA, SP	PDS	PAPUA-KRISTEN
14	ISHAK FELLE	PNBKI	PAPUA-KRISTEN
15	SIMSON BANUNDI	PATRIOT	PAPUA-KRISTEN
16	SAHARUDIN	BURUH	MIGRAN-ISLAM
17	FRANKLIN E. WAHEY.S.Sos	HANURA	PAPUA-KRISTEN
18	PAULUS KOGOYA	PIS	PAPUA-KRISTEN
19	AHMAD PAITO	PKS	MIGRAN-ISLAM
20	PAULUS PATTI	PNI MARHAENISME	MIGRAN-KRISTEN
21	DECKY. H.N YAKORE	PKPI	PAPUA-KRISTEN
22	BACHTIAR, S.Sos	PPP	MIGRAN-ISLAM

23	HANNA WASANGGAI	PPD	PAPUA-KRISTEN
24	FREDI DEPAMETOUW	PNK	PAPUA-KRISTEN
25	DORINCE MEHUE	PRN	PAPUA-KRISTEN

Sumber: Kesbang, Tahun 2009 diolah oleh Penulis

Tabel. 6.3
Daftar Anggota Legislatif Hasil Pemilu
Tahun 2014-2019

NO	NAMA	PARTAI	ETNIS/AGAMA
1	EDISON AWOITAU, ST	NASDEM	PAPUA-KRISTEN
2	ISMAIL MAMBI, SE	NASDEM	MIGRAN-KRISTEN
3	Hj. SUMIRAH	NASDEM	PAPUA-KRISTEN
4	YANES TELENGGEN	NASDEM	PAPUA-KRISTEN
5	KLEMENS HAMO	NASDEM	PAPUA-KRISTEN
6	ABRAHAM DEMONGGRENG	NASDEM	PAPUA-KRISTEN
7	Drs. H. MUHAMMAD AMIN	PKB	MIGRAN-ISLAM
8	APOLOS YAMBAYABDI, SH	PKB	PAPUA-KRISTEN
9	AINUR ROFIQ, S. Pd.I	PKS	MIGRAN-ISLAM
10	HERMES FELLE	PDIP	PAPUA-KRISTEN
11	SOLEMAN MANURI	PDIP	PAPUA-KRISTEN
12	KORNELES YANUARING	PDIP	PAPUA-KRISTEN
13	PATRINUS R. N. SORONTOU	PDIP	PAPUA-KRISTEN
14	STENLY ONDIKELEUW, ST	GOLKAR	PAPUA-KRISTEN
15	ABDUL RAHMAN SULAIMAN	GOLKAR	MIGRAN-ISLAM
16	FREDRIK KAWAY, SH	GOLKAR	PAPUA-KRISTEN
17	BILCE BIRENS MEHUE	GERINDRA	PAPUA-KRISTEN

18	DARIUS IZAK DANYA	GERINDRA	PAPUA-KRISTEN
19	OKTOVIANUS SAMON	GERINDRA	PAPUA-KRISTEN
20	MOZES KALLEM, SH	DEMOKRAT	PAPUA-KRISTEN
21	ELIAB ONGGE, S. IP.,MM	DEMOKRAT	PAPUA-KRISTEN
22	KAREL SAMONSABRA, SH	DEMOKRAT	PAPUA-KRISTEN
23	METHEIS LEWERISSA	DEMOKRAT	MIGRAN-KRISTEN
24	EYMUS WEYA, ST	PAN	PAPUA-KRISTEN
25	YOHANES ALEXANDER HIKOYABI	HANURA	PAPUA-KRISTEN

Sumber: KPU Kabupaten Jayapura, Tahun 2015 diolah oleh Penulis

Kedua hasil pemilu seperti yang tergambar pada tabel di atas, memperlihatkan dominasi Orang Asli Papua. Namun demikian, ada hal yang berbeda dalam konstalasi penguasaan partai politik di parlemen tingkat kabupaten tersebut. Selama ini, dominasi Partai Golongan Karya (GOLKAR) dalam sekian tahun tergeser oleh partai politik pendatang baru, yaitu Partai Nasional Demokrat (NASDEM), demikian pula diikuti pergeseran jabatan bupati dan ketua DPRD Jayapura, bila pada tahun 2009 bupati Habel Melkias Suwae, S.Sos.,MM dan ketua DPRD Anis Eluway, SH dari unsur partai Golongan Karya (GOLKAR), maka tahun 2014 bupati Mathius Awoitauw, SE.,M.Si dan ketua DPRD Edison Awoitauw, ST dari unsur Partai Nasional Demokrat (NASDEM). Tetapi dari sisi kepapuaan keduanya dipimpin dan dan kuasai oleh putra asli Papua.

Fakta tersebut di atas membantah apa yang pernah diutarakan oleh Haris (1999) dengan mengatakan bahwa Indonesia diambang Perpecahan karena kasus penguasaan posisi jabatan yang terjadi di Papua.

“Selama bergabung dengan Indonesia dominasi birokrasi etnis non Irian terjadi baik di Provinsi maupun di Kabupaten. Implikasinya adalah peranan orang-orang

Irian dalam pengambilan keputusan mengenai mereka sendiri terasa termarginalkan. Pembinaan aparatur dari pusat maupun daerah dipandang tak menghasilkan putra daerah Irian. Bahkan pejabat di Pemda maupun di Kantor Wilayah Departemen Teknis di Daerah Provinsi dan Kabupaten ternyata diisi oleh orang-orang non Irian. Dominasi non-Irian ini pada akhirnya hanya menghasilkan kebijakan, penyelesaian masalah politik dan sebagainya yang cenderung mengabaikan kepentingan rakyat Irian”

Apa dikemukakan oleh Haris tersebut di atas sebenarnya betul adanya, namun pada konteks saat Papua belum mengalami pemberlakuan otonomi khusus Papua, terlebih pada masa orde baru, pejabat yang diangkat biasanya hasil dari dropan dari Jakarta.

Sejak otonomi khusus Papua, posisi strategis yang dulunya dikuasai oleh para migran telah beralih kepada Orang Asli Papua sebagai bagian dari spirit yang dibawa oleh keberpihakan otonomi khusus. Bagian-bagian posisi jabatan yang terkecil sekalipun telah ditempati oleh Orang Asli Papua. Hal ini menjadi lumrah karena ketika terjadi kesadaran politik berdasarkan etnis biasanya muncul secara terbuka keinginan untuk melakukan monopoli jabatan-jabatan termasuk pada jabatan strategis (Haboddin, 2012)

Uraian di atas mengantarkan pada realitas kehidupan politik di Kabupaten Jayapura Papua yang telah mengistimewakan komunitas Orang Asli Papua atas dasar legitimasi dari adanya undang-undang otonomi khusus Papua yang memberikan keberpihakan kepada mereka. Buah dari keistimewaan tersebut menjadikan posisi-posisi yang strategis di legislatif dan eksekutif bagi Orang Asli Papua sementara bagi migran tidak mendapatkannya. Pihak migran menjadi kelompok masyarakat kelas dua. Pengisian personal dalam jabatan-jabatan struktural di pemerintahan terlihat mana untuk Orang Asli Papua dan mana untuk migran. Terjadi pemisahan-pemisahan posisi politik atas dasar etnisitas. Pada saat kebijakan otonomi khusus yang memarginalkan posisi politik masyarakat migran yang

mengharuskan mereka harus mengakui hak politik Orang Asli Papua, dengan momen ini Orang Asli Papua melakukan dominasi di semua lini politik, terutama di lingkungan birokrasi pemerintahan.

6.2 . Hubungan Politik Kontestatif – Afirmatif

Kehidupan politik saat ini telah membuka ruang-ruang pertemuan yang mengkondisikan para pihak untuk saling bersaing baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam keadaan tertentu, realitas politik dalam suatu wilayah akan berhadapan dengan realitas sosial masyarakat yang mengharuskan adanya terobosan-terobosan baru yang berpotensi menciptakan friksi, resistensi bahkan ancaman disintegrasi, yang berpotensi melahirkan ketegangan dalam kehidupan bermasyarakat. Hal ini merupakan akibat dari adanya politik desentralisasi yang terjadi secara nasional pasca tumbangannya masa orde baru dari masa sentralisasi yang semuanya harus dikondisikan oleh pusat.

Di Papua, kondisi kehidupan politik yang menghadapkan masyarakat pada pilihan-pilihan subjektif makin mengemuka dengan pemberlakuan undang-undang otonomi khusus bagi Papua. Dalam hal kesempatan pada lapangan pekerjaan sebagai Pegawai Negeri Sipil, Undang-Undang Otonomi Khusus No.21 Tahun 2001 Papua, pada pasal 62 ayat 2, dengan jelas mengafirmasi orang Papua dalam penerimaan sebagai pegawai bahwa “Orang Asli Papua berhak memperoleh kesempatan dan diutamakan untuk mendapatkan pekerjaan dalam semua bidang pekerjaan di wilayah propinsi Papua berdasarkan pendidikan dan keahliannya” (Badan Kesatuan Bangsa Propinsi Papua, 2005:44).

Kebijakan Otonomi Khusus bagi Papua memberikan berbagai kemudahan bagi Orang Asli Papua semakin terbuka lebar, termasuk dalam mendapatkan pekerjaan di instansi formal. Disisi lain, giliran para migran yang sulit bersaing dan cenderung akan tersingkir dengan sendirinya. Namun demikian, hal ini hanya berlaku untuk instansi pemerintah otonom. Data tahun

2008-2010 menunjukkan bahwa dalam perekrutan pegawai oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Jayapura tampak keberpihakan untuk Orang Asli Papua, sedangkan bagi migran dapat diterima menjadi pegawai negeri di lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Jayapura pada formasi yang tidak dikuasai oleh Orang Asli Papua, seperti formasi guru di bidang eksakta dan tenaga kesehatan atau pada bidang yang memerlukan keahlian tertentu. Walau Orang Asli Papua mendominasi formasi dalam penerimaan pegawai pada dinas dan badan yang ada, namun migran terlihat dominan pada dua dinas, yakni dinas pendidikan dan dinas kesehatan. Sebabnya, migran pada dua dinas tersebut masih lebih unggul dalam penyediaan tenaga yang kompeten dibandingkan dengan Orang Asli Papua, sehingga bagi Orang Asli Papua terpaksa merelakan posisi ini untuk diberikan kepada migran.

Tabel. 6.4
Penerimaan Pegawai PEMDA Kabupaten Jayapura Tahun 2008 - 2010

NO	TAHUN	URAIAN	JUMLAH	%
1	2008	Papua	73	58,40%
		Migran	52	41,60%
2	2009	Papua	156	63,40%
		Migran	90	36,60%
3	2010	Papua	127	56,95%
		Migran	96	43,05%

Sumber : Data kepegawaian tahun 2008-2010 PEMDA Kabupaten Jayapura, diolah penulis tahun 2018

Dari penerimaan pegawai tersebut di atas berlanjut dengan euphoria jargon harus “menjadi tuan di negeri sendiri” yang

berimplikasi pada perebutan posisi-posisi strategis dalam politik dan pemerintahan yang tidak lagi mengedepankan aspek persyaratan dan kompetensi sebagai yang seharusnya bagi calon pejabat, Orang Asli Papua harus didahulukan dibanding migran yang juga dapat diterjemahkan sebagai lahirnya politik kelas dalam masyarakat. Bapak “C”, sebagai seOrang Asli Papua yang menjabat di Pemda Kabupaten Jayapura mengakui:

“Untuk masalah tenaga khususnya untuk putra asli Papua, disetiap instansi yang ada...di Kabupaten Jayapura, sebenarnya sudah terakomodir, kita bisa lihat dari setiap instansi, ya..paling tidak 60 : 40 , ya..kita masih lebih banyak daripada pendatang. untuk masalah PNS cukup untuk anak-anak Papua”³

Posisi-posisi strategis tersebut di atas merupakan bagian dari harapan yang sudah terjadi dan dominasi Orang Asli Papua untuk menjadi Tuan di negeri sendiri sekaligus untuk mengambil alih posisi-posisi yang selama masa sebelum otonomi khusus dikuasai oleh migran. Walau juga diakui bahwa beberapa posisi jabatan tertentu yang memerlukan keahlian, migran masih diberi ruang untuk duduk di posisi dimaksud, seperti dalam bidang keuangan dan dinas kesehatan.

Pendapat yang sama dikemukakan oleh oleh bapak “B” yang merupakan tokoh Paguyuban Jawa-Madura sebagai berikut.

“Kalau diskriminasi masalah agama terutama dari pemerintahan, secara mutlak tidak, tapi secara kasat mata pasti, itu pasti pak, itu pasti begitu. Ya...begitu...jadi ada klasifikasinya disitu pak..,”⁴

Pandangan bapak tersebut seperti ingin mengatakan bahwa persoalan diskriminasi secara tertulis yang menyangkut soal keagamaan tidaklah didapatkan, tetapi bila ingin dilihat dari sikap dan perilaku oknum pastilah ada bila masyarakat dilihat berdasarkan pada klasifikasi. Bahkan dalam sebuah kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Jayapura yang dituang dalam Surat

³ Hasil wawancara dengan “C”, hari Senin tanggal 02 Oktober 2017

⁴ Hasil wawancara dengan “B”, hari Rabu Tanggal 27 September 2017

Keputusan Bupati Jayapura Nomor: 800/11/S.PENG/SET Tahun 2018 Tentang Seleksi Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Daerah Pemerintah Kabupaten Jayapura Formasi Tahun 2018 yang dimuat di media massa baik cetak maupun elektronik bahwa penerimaan PNS secara diperuntukkan sebanyak 80% untuk Orang Asli Papua (OAP) dan sisanya 20% untuk Non Papua

Tidak berhenti sampai disitu, semangat keakuan yang terbangun itu menjalar sampai pada sektor terkecil kepemimpinan dalam masyarakat dengan dibentuknya kampung adat berdasarkan pada Peraturan Bupati Jayapura Nomor 8 Tahun 2016 tentang Kampung Adat dan Peraturan Daerah Kabupaten Jayapura Nomor. 8 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pengakuan, Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat. Pembentukan kampung tersebut tidak terlepas dari semangat dan respon otonomi khusus yang diinginkan oleh Orang Asli Papua untuk mendapatkan keistimewaan lewat kampung yang spesifik, menurut adat dan kebiasaan masyarakat adat yang berbeda dari kampung-kampung yang sudah ada sebelumnya agar eksistensi Orang Asli Papua beserta hak-hak tradisionalnya tetap diakui dan dihormati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Disamping kampung-kampung yang telah terbentuk sebelumnya yang selama ini telah ada seperti yang ada di daerah lain. Misalnya di Bali ada desa adat. Bila di Bali keberadaan desa adat karena dilatar belakangi oleh tradisi dan adat istiadat yang telah lama dan mengakar pada masyarakatnya sehingga semangat untuk menumbuhkan kembali menjadi lebih mudah dan penerimaan masyarakat umum Bali terhadap desa adat tersebut adalah keinginan semua komponen masyarakatnya dan lebih banyak terilhami dari ajaran Hindu Dharma Bali (Noviasi, 2015). Sementara di Kabupaten Jayapura, ada kampung adat juga karena diilhami untuk menghidupkan kembali kampung-kampung yang pernah ada pada saat dimana adat masih sangat kuat dalam tradisi mereka. Tetapi pendiriannya disamping alasan tadi juga karena semangat otonomi khusus Papua yang menginginkan adanya

lembaga kampung adat sehingga peran desa yang telah ada belum bisa disingkronisasikan karena adanya aroma keinginan dominasi adat.

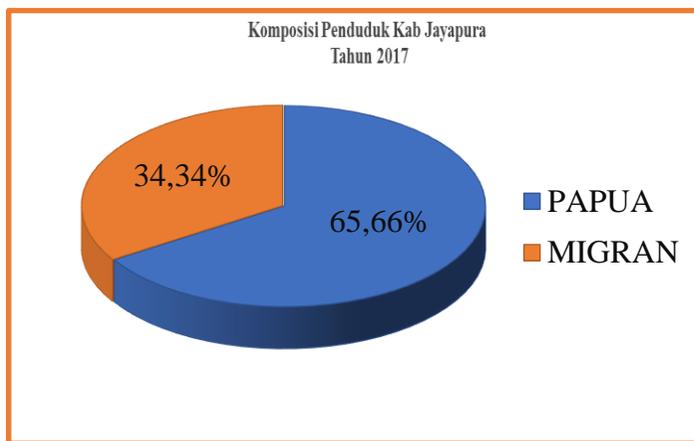
Kondisi yang tergambar diatas, memaksa kelompok migran untuk harus terus menggali nilai-nilai keratifitas yang ada pada diri mereka agar keberadaannya tetap mendapatkan porsi yang layak, meskipun terus menerus mendapatkan tantangan berupa batas afirmatif yang dibuat oleh undang-undang. Dalam perspektif lain, sesungguhnya keberadaan dan kemampuan para migran ini cukup mendapatkan apresiasi dari kelompok Orang Asli Papua karena dari sisi alasan posisi representasi politik cukup diperhitungkan sehingga Orang Asli Papua yang bergelut di dunia politik tertarik untuk berkolaborasi dengan masyarakat migran. Dapat dilihat dari jumlah migran Muslim yang ada di Kabupaten Jayapura secara kuantitatif cukup signifikan seperti dalam kontestasi pemilihan kepala daerah, Jumlah suara yang besar merupakan modal utama untuk dapat diperhitungkan oleh kelompok-kelompok politik dalam mengambil berbagai keputusan.

Perebutan suara dari Migran Muslim bukan hanya dilakukan antara orang Papua dengan migran, akan tetapi juga dilakukan sesama Orang Asli Papua yang sedang bertarung memperebutkan kursi kekuasaan seperti di Kabupaten Jayapura. Mereka berusaha untuk memperoleh simpatik dari migran muslim yang ada dengan menggunakan berbagai cara agar suara migran memihak pada mereka. Potensi suara yang besar tersebut berusaha dikuasai oleh kelompok Orang Asli Papua untuk dapat memenangkan pilihan. Dalam berebut massa tersebut tidak jarang bagi mereka melakukan berbagai cara termasuk dengan cara menekan migran yang mendiami tanah *ulayat* mereka. Akibatnya, pihak migran terpaksa berada pada posisi dilematis, akhirnya memilih untuk ikut kelompok Orang Asli Papua. Cara lain pihak Orang Asli Papua sebagai peserta kontestan dalam pilkada adalah membangun komunikasi dengan berbagai paguyuban kedaerahan

agar mendapatkan simpatik dan dukungan sambil disuguhi berbagai janji yang akan dijawab setelah terpilih.

Jumlah total penduduk Jayapura saat ini adalah 228.558 orang. Sedangkan jumlah migran yang menetap di Kabupaten Jayapura saat ini mencapai 78.495 atau 34% (Lihat Tabel 5.3) Sedangkan Jumlah total penduduk Kota Sentani selaku ibukota kabupaten adalah 112.148 jiwa, dan jumlah migran di Sentani mencapai 43.481 jiwa atau 38% (BPS, 2017).

Gambar. 6.1
Komposisi Jumlah Penduduk Kabupaten Jayapura



Sumber : Profil Kabupaten Jayapura, Tahun 2017

Hal tersebut di atas diutarakan oleh bapak “B”, seperti berikut:

“Orang Asli Papua sangat membutuhkan suara para pendatang. Karena tanpa dukungan pandatang ya..saya katakan tadi jumlah dari pada penduduk itu sendiri kita lebih banyak pak di sini (Sentani). Sangat membutuhkan. Dengan kebutuhan itulah sehingga masalah politik, Para pendatang juga sebagai penentu kemenangan”⁵

Dari penjelasan di atas menunjukkan bahwa dalam hal mencari dukungan massa, Orang Asli Papua sangat membutuhkan

⁵ Hasil wawancara dengan “B”, hari Rabu Tanggal 27 September 2017

dukungan kaum migran yang ada di Kabupaten Jayapura untuk dapat bekerjasama dalam menduduki posisi-posisi penting, baik di legislatif maupun eksekutif. Terdapat kebutuhan saling mempengaruhi karena kelompok migran hampir berimbang dengan Orang Asli Papua khususnya di wilayah perkotaan seperti kota Sentani. Dapat dilihat pada data di bawah mayoritas kandidat bupati dari Orang Asli Papua terlihat didampingi calon wakil bupati dari masyarakat migran.

Tabel. 6.5
Calon Bupati Jayapura Tahun 2017-2022

NO	NAMA CALON	ETNIS
1	Yanni, SH - Zadrak Afasedenya, SP	Migran Muslim - Papua
2	Mathius Awoitauw, SE.,- M.Si - Giri Wijayantoro	Papua - Migran Muslim
3	Godlief Ohee - Drs. Frans Gina	Papua - Papua
4	Siska Yoku,SH - Marselino Waromi	Papua - Papua
5	Jansen Monim, ST.,MM – Abdurrahman Sulaiman, SE	Papua - Migran Muslim

Sumber: KPU Kabupaten Jayapura, Tahun 2017

Meski untuk menduduki posisi puncak telah dibatasi oleh Undang-Undang Otonomi Khusus, para migran tetap diperhitungkan secara signifikan, minimal sebagai orang nomor dua seperti wakil bupati, dan pada jabatan di pemerintahan seperti posisi setingkat kepala Dinas dan Badan. Artinya Orang Asli Papua yang berkeinginan menjadi bupati melihat posisi migran penting selalu dilibatkan, bahkan nyaris wajib melibatkan migran sebagai pasangan dalam berkontestasi dalam Pilkada. Hal tersebut bukan dilihat dari aspek kuantitas migran, tetapi juga karena modal yang dimiliki para migran baik sosial, budaya dan ekonomi sangat kuat. Menurut Bourdieu (1977: 503), modal sosial adalah “Modal hubungan sosial yang jika diperlukan akan memberikan dukungan-dukungan bermanfaat: modal harga diri dan kehormatan yang seringkali diperlukan jika orang ingin

menarik para klien ke dalam posisi-posisi yang penting secara sosial, dan yang bisa menjadi alat tukar, misalnya dalam karir politik”. Lebih jauh Bourdieu (1992:119) menambahkan bahwa sesungguhnya adalah jumlah sumber daya, aktual atau maya, yang berkumpul pada seorang individu atau kelompok karena memiliki jaringan tahan lama berupa hubungan timbal balik perkenalan dan pengakuan yang sedikit banyak terinstitusionalisasikan.

Pernyataan Bourdieu sejalan dengan apa yang diutarakan oleh bapak “D”, yang merupakan Tokoh Kerukunan Keluarga Buton, Sulawesi Tenggara yang sebagai berikut:

“...itukan demokrasi membutuhkan sebanyak mungkin suara yang didukung itu, namun bagi saya siapa pun yang jadi apalagi dengan kebijakan daerah gitu yang harus ditawarkan itu adalah asli Papua, yang pentingkan ketenangan, karena kalau disini kita membiarkan kita berambisi juga, ngapain....kalau politikkan sifatnya posisi, atau jabatanlah itu...”⁶

Kenyataan di atas menunjukkan bahwa hubungan sosial dan politik yang terjalin antara kaum migran dengan Orang Asli Papua jika diperlukan akan memberikan dukungan-dukungan yang bermanfaat. Modal harga diri dan kehormatan yang seringkali diperlukan jika orang ingin menarik para klien ke dalam posisi-posisi yang penting secara sosial, dan yang bisa menjadi alat tukar, misalnya dalam karir politik bagi orang Papua dan kesepakatan yang dibangun untuk kepentingan migran yang ada di Kabupaten Jayapura.

Realitas yang tergambar diatas, menunjukkan selain jumlah yang cukup besar, kaum migran juga karena faktor modal penguasaan sektor ekonomi sebagaimana yang telah dijelaskan pada bagian-bagian sebelumnya menjadikan posisi kelompok migran menjadi sumber kekuatan dan pendorong munculnya kekuatan di bidang politik yang ada di Kabupaten Jayapura

⁶ Hasil wawancara dengan “D”, hari Sabtu Tanggal 30 September 2017

dengan konsekuensi paling tidak migran telah turut serta mempengaruhi kebijakan di Kabupaten Jayapura walau mereka tau dan sadar diri telah berlaku afirmasi bagi Orang Asli Papua dalam bidang politik. Dalam hal ini, otonomi khusus Papua bagi migran merupakan bentuk tawaran solusi (*win win solution*) dalam penyelesaian masalah dinamika Papua yang sewaktu-waktu selalu mencuat ke permukaan akibat Orang Asli Papua selama ini merasa terlalu dihegemoni oleh pihak migran, dalam hal ini adalah pemangku kebijakan di Jakarta, tentu keputusan keberpihakan kepada Orang Asli Papua sangat politis demi bagian dari keberlangsungan status politik dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kontestasi dalam bidang politik, menjadikan posisi Orang Asli Papua dalam penguasaan di legislatif yang diafirmasi sebagaimana memperlihatkan data berikut dari dua hasil pemilu.

Tabel 6.6
Jumlah Perolehan Suara Pemilu
Tahun 2009-2014 dan 2014-2019 Kabupaten Jayapura

TAHUN	JUMLAH			KATEGORI	TAHUN	JUMLAH		
	KURSI	SUAR A	%			KURSI	SUAR A	%
2009 - 2014	5	1.858	5,71	MIGRAN MUSLIM	2014 - 2019	4	4.308	4,70
	18	30.358	93,32	PAPUA		19	85.129	92,89
	2	314	0,97	LAIN- LAIN		2	2.212	2,41
JUMLAH	25	32.530	100			25	91.649	100

Sumber: Kesbang, tahun 2009 dan KPU Kabupaten Jayapura, Tahun 2015

Pada dua pemilu yang telah lewat memperlihatkan tahun 2009, dengan jumlah suara yang diperebutkan untuk duduk di kursi

legislatif tampak dari total 32.530 suara, pihak Orang Asli Papua mendominasi kursi dilegislatif. Demikian pula pada hasil pemilu tahun 2014, dari perkembangan jumlah suara yang sangat signifikan selama lima tahun dari pemilu tahun 2009 dengan total pemilih sebanyak 91.649 orang, memperlihatkan posisi Orang Asli Papua setelah dalam kontestasi yang diketahui ada afirmasi kepada mereka, juga mendominasi posisi di legislatif.

Dengan uraian tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa dengan otonomi khusus Papua, para pihak antara migran dan Orang Asli Papua berelasi dalam politik yang berbentuk kontestatif-afirmatif. Posisi jabatan-jabatan di eksekutif dan di legislatif sesungguhnya masih ada ruang-ruang yang dapat kedua belah pihak untuk bersaing untuk mendudukinya. Dalam hal ini, migran sebenarnya melebihi Orang Asli Papua dalam penyediaan sumber daya yang ada, namun karena semangat desentralisasi yang sangat kuat, maka sekali lagi kontestasi politik yang terjadi lebih kepada keberpihakan bagi Orang Asli Papua.

6.3 Pengembangan Politik Alokatif-Representatif

Tarik-menarik posisi politik antara Orang Asli Papua dan migran di ranah publik di Kabupaten Jayapura saat ini berlangsung sangat dinamis. Namun demikian, dalam konteks tertentu para migran berada pada posisi yang subordinat. Menyikapi keadaan ini, migran terlibat dalam berbagai aktivitas dan mengerahkan potensi yang dimiliki untuk tetap eksis. Kebijakan otonomi khusus memang sangat mempengaruhi hubungan migran dengan Orang Asli Papua. Hubungan yang bercorak konflik bahkan tidak jarang ditemukan dalam segala level kehidupan khususnya politik. Hal ini erat kaitannya dengan penguasaan sektor politik oleh Orang Asli Papua baik eksekutif maupun legislatif.

Penguasaan sektor politik oleh Orang Asli Papua tidak hanya mempengaruhi pola hubungan, tetapi juga status migran bahkan juga berdampak pada pemukiman atau domisili. Para migran umumnya mendiami kota dan wilayah pesisir sebagai

tempat perjumpaan dengan penduduk lokal setempat. Sejarah keberadaan para migran di Kabupaten Jayapura tampaknya sedikit berbeda apabila melihat letak geografis dan pusat kota yang lumayan berjarak dari tepi pantai. Mayoritas penduduk migran, yang dimobilisasi oleh pemerintah melalui program transmigrasi, penempatannya dipusatkan di lembah Grime Nawa (Distrik Nimbokrang dan Yapsi). Oleh karena itu, keberadaan migran juga merupakan bagian yang tak terpisahkan dari sejarah lahirnya Kabupaten Jayapura. Terhitung beberapa tokoh migran pernah menduduki posisi-posisi utama di birokrasi pemerintahan Kabupaten Jayapura maupun di legislatif (Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Jayapura), bahkan beberapa tokoh migran dianggap berperan penting bagi lahirnya Kabupaten Jayapura.

Seperti telah dijelaskan sebelumnya, posisi-posisi migran di eksekutif dan legislatif menjadi rentan sejalan dengan implementasi UU No 21 tahun 2001. Semangat “Papuanisasi” yang menjadi roh utama undang-undang tersebut secara langsung membatasi keberadaan migran khususnya dalam menduduki posisi strategis, karena dianggap berpotensi melanggar amanah konstitusi yang hanya berlaku khusus di Papua. Menarik memang jika mengamati fenomena semangat Papuanisasi ini, karena secara nyata, kontestasi-kontestasi politik yang mensyaratkan dukungan penuh publik, misalnya pemilihan bupati kepala daerah, lahir fenomena akomodatif bagi para migran sebagai pendamping orang asli, karena potensi pemilih dari kelompok migran sangat menentukan keterpilihan seseorang. Bahkan, saat ini wakil bupati Kabupaten Jayapura adalah migran yang berasal dari Jawa. Peristiwa serupa juga pernah terjadi sebelumnya ketika di pucuk pimpinan daerah terdapat migran.

Saat ini, migran dengan jumlah yang relatif signifikan menjadi modal yang cukup untuk diperhitungkan dalam keterlibatan konstalasi politik daerah (lokal). Akan tetapi, sekali lagi jumlah tidaklah menjadi penentu bagi migran untuk secara aktif terlibat dalam politik. Sebab, dorongan kuat justru datang dari regulasi atau kebijakan keistimewaan Papua. Jumlah yang

sesungguhnya signifikan tidak mampu membendung arus undang-undang otonomi khusus. Hal ini kemudian bersampak pada adanya pembatasan secara jelas atas ‘hak politik’ migran. Keterlibatan migran dalam politik lebih cenderung bersifat ‘*second line*’ yang mendukung Orang Asli Papua dalam banyak hal. Pembatasan politik dan dampaknya bagi kehidupan Papua setikanya dapat terlihat pada adanya ruang yang terbuka yang kuat yang menuntut hak-hak politik Orang Asli Papua yang selama ini dikendalikan oleh pusat, termasuk keinginan menuntut kemerdekaan. Dengan pembatasan tersebut, semangat “Papuanisasi “ yang menuntut peran lebih banyak di berbagai bidang dan tingkatan, namun pada pihak lain liberalisasi politik yang terjadi tahun 1998 yang menuntut kuatnya peran partai politik bersama sistem pemilihan langsung secara tidak langsung ikut mempengaruhi akses masyarakat migran dalam konstalasi politik di Papua.

Realitas bahwa ada pembatasan dalam jabatan dan porsi yang lebih banyak untuk Orang Asli Papua, tidak sepenuhnya berarti migran tidak ikut berpartisipasi dalam politik. Mereka mengikuti situasi dengan menggabungkan diri dengan menjadi pengurus dalam berbagai partai politik yang ada baik yang berhaluan nasionalis maupun agamis. Demikian pula dalam bidang birokrasi, posisi migran dalam jabatan struktural juga sangat dibatasi karena adanya semangat otonomi khusus tersebut. Bagi migran yang semestinya dapat menduduki posisi di birokrasi harus berdiam sambil melihat peluang dan tetap selalu siap sedia bila sewaktu-waktu dibutuhkan pada posisi yang dibutuhkan. Jabatan setingkat kepala dinas/badan/kantor di birokrasi pemerintahan daerah mayoritas diduduki oleh Orang Asli Papua. Migran hanya menduduki posisi-posisi di bawahnya.

Dalam situasi tertekan, masyarakat migran memunculkan perubahan-perubahan peran, khususnya peran para tokoh atau elite yang dapat diterima dengan realitas yang ada serta bersikap realistis terhadap ketetapan bahwa otonomi khusus Papua menjadi keistimewaan Orang Asli Papua. Para migran banyak

bergantung terhadap elite mereka ke mana suara misalnya mereka akan salurkan pada setiap pemilu. Tentu sangat sangat terkait dengan hubungan-hubungan primordial mereka baik secara agama dan etnis dan situasi kapan dan kepada siapa Orang Asli Papua yang dapat dijadikan pemimpin politik (Jackson dalam Mulkhan, 2010:91). Fleksibilitas peran ini memberikan peluang bagi migran untuk tetap pada posisi sebagai kelompok baru, namun memiliki kesempatan bagi pengembangan diri ke depan melalui pilihan jalan hidup di Kabupaten Jayapura Papua.

Kaum migran tidak mungkin melawan kekuatan pembatasan tersebut secara frontal. Bukan karena Orang Asli Papua sekarang lebih kuat secara politik, melainkan justru karena ada perasaan “sadar diri” sebagai migran untuk beradaptasi pada situasi yang ada. Hal yang bisa dilakukan adalah bertahan, walaupun melakukan perlawanan maka itu sifatnya “*soft*” untuk tetap mempertahankan eksistensi diri dari tekanan secara fisik dan psikis. Sebagaimana kata James. C. Scott, seperti analogi kasus buruh petani di Kedah Malaysia, bagaimana dalam perlawanan yang halus membangun strategi mempertahankan hidup dan berjuang di antara perlawanan-perlawanan, (Scott, 1993: 169-170; Scott, 2000 : 39-40). Orang migran “memberontak” dengan situasi yang dialami namun tidak dengan cara konfrontatif, tetapi bergelut dengan dinamika yang ada yang sedang berlangsung. Bagi Abdul Munir Mulkhan kadang suatu keadaan yang mungkin kelihatan bertentangan dan secara teori saling menegasikan hidup dalam sebuah komunitas, tetapi dengan kreatifitas mampu melahirkan jalan baru, dengan meleburkan nilai dalam sinergi (Mulkhan, 2010 : 291). Demikian bagi para migran meskipun tidak banyak diberi ruang dalam politik lokal, namun mereka tetap menjalani hidup dengan rutinitas yang ada dan tidak menutup diri dengan orang Papua. Bertahan hidup menurut Steward, (dalam Haviland, 1993:11) dengan cara-cara adaptif, dengan melakukan tugas-tugas yang harus dikerjakan sebagai seorang migra demi menjaga dan melindungi hak milik yang meliputi budaya dan identitasnya. Migran melakukan penyesuaian

yang berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya kebutuhan yang diperlukan ketika berhadapan dengan situasi menekan.

Dengan jumlah migran yang ada, suara mereka sebenarnya sangat diperhitungkan khususnya ketika dikaitkan dengan kepentingan pemilihan kepala daerah. Posisi migran sangat strategis karena ia dapat menjadi penentu kemenangan salah satu calon kepala daerah. Pada Pilkada pada tahun 2017 misalnya, pasangan Mathius Awoitau-Giri Wijayantoro merupakan wujud dari signifikansi suara migran. Pasangan ini terdiri atas Orang Asli Papua (calon Bupati) dan migran Jawa (calon Wakil Bupati) yang pada akhirnya memenangkan pertarungan. Keterlibatan migran bagi kemenangan pasangan ini diakui oleh beberapa kalangan. Seorang informan bapak "C", Pejabat PNS Pemda Kabupaten Jayapura, mengatakan:

“kita di sini sudah ada ikatan-ikatan keluarga besar, kerukunan-kerukunan, paguyuban-paguyuban sangat mempengaruhi sekali, Jayapura, ya dibilang begitu, apa...kita apa..sama-sama, seimbang penduduknya”⁷

Pernyataan di atas selain menunjukkan kuanya ikatan-ikatan kedaerahan di kalangan migran, juga memberikan penjelasan betapa pentingnya sebuah kolektivisme. Migran yang berjumlah besar, turut menentukan kemenangan salah satu calon kepala daerah.

Pertambahan jumlah migran dari tahun ke tahun serta soliditas yang terbangun selama sekian tahun dalam ikatan-ikatan etnisitas merupakan cara yang dapat digunakan pihak migran dalam merespons situasi politik lokal Papua. Mereka yang berkecimpung dalam partai politik misalnya, secara umum memiliki latar belakang sosial berbeda-beda baik modal sosial, modal ekonomi maupun budaya. Ketiga modal tersebut dielaborasi ketika masuk ke dalam partai politik. Migran yang tergabung dalam kepartaian, secara umum adalah orang-orang yang memiliki kemampuan (finansial) yang dapat dimanfaatkan

⁷ Wawancara dengan "C", hari Senin tanggal 02 Oktober 2017 di Sentani.

dalam membangun komunikasi dan relasi dengan Orang Asli Papua. Selain itu, kualitas SDM migran menjadi kunci keberhasilan masuk dalam partai politik. Kemampuan tersebut mereka dapatkan dari pengalaman dan pendidikan yang selama ini dilalui, ada yang didapatkan dari pendidikan formal sebagai sarjana di perguruan tinggi, ada pula dengan pendidikan ditambah pengalaman bertahun-tahun selama ini berinteraksi dalam kehidupan Papua seperti menjadi pengurus organisasi kepemudaan dan organisasi kemasyarakatan, sehingga dengan kejelian dalam melihat situasi dapat memungkinkan untuk masuk berkecimpung dalam dunia politik. Modal ini juga yang mengantarkan beberapa orang (migran) yang berhasil terpilih menjadi anggota legislatif (DPRD) Kabupaten Jayapura

Beberapa tokoh dari kalangan migran Muslim yang berhasil duduk di legislatif antara lain Ainur Rofiq, S.Pd (Jawa, PKS), Drs. H. Amin (Bugis, PKB) dan Hj. Sumirah (Bugis, Partai NASDEM) serta Abdurrahman Suleiman (Bugis, Partai Golkar). Demikian pula pada pemilihan legislatif tahun 2009-2019 kaum migran dapat menempatkan wakilnya di legislatif sebagai representasi partainya dan konstituen yang diwakilinya, Drs. H. Nurdin Faisal (Makassar, GOLKAR), Bachtiar, SE (Bugis, PPP), Saharudin (Makassar, Partai Buruh), Ahmad Paito, S.Pd.I (Jawa, PKS) dan Amir Hamzah (Jawa, PKB). Begitu pula dalam dalam jabatan eksekutif migran sukses mengantarkan politisi Partai Nasional Demokrat, Giri Wijayantoro (Jawa, NASDEM) sebagai wakil bupati Jayapura periode 2018-2023. Mereka terpilih melalui jalur partai yang berbeda-beda, artinya tidak hanya pada satu partai politik.⁸

⁸ Sejumlah migran yang aktif masuk di berbagai partai politik baik yang berbasis agama maupun nasionalis dan berhasil masuk dalam legislatif. Seperti Ainur Rofiq, S.Pd.I (Politisi PKS), Drs. H. Amin (Politisi PKB) dan Hj. Sumirah (Politisi Partai NASDEM) serta Abdurrahman Suleiman (Politisi Partai Golkar). Adapun di level eksekutif, adalah Giri Wijayantoro (Jawa, Wakil Bupati periode 2017-2022). Demikian pula pada tahun 2009, kaum migran berusaha dari berbagai latar belakang partai masuk di legislatif tahun 2009-2019 kaum migran dapat menempatkan wakil di legislatif sebagai

Keterlibatan mereka dalam partai politik yang kemudian menjadikannya terpilih tidak lepas dari dua kondisi. *Pertama*, tuntutan otonomi khusus bagi Papua yang justru memunculkan kreativitas-kreativitas baru bagi migran. Mereka pada akhirnya tidak tinggal diam dan mengikuti secara alamiah implementasi undang-undang otonomi khusus tersebut. *Kedua*, dukungan internal (migran) yang memungkinkan keterlibatan secara langsung dalam politik (kontestasi) di tingkat lokal. Kehadiran migran di legislatif tidak hanya melengkapi dinamika politik di Kabupaten Jayapura, tetapi juga menunjukkan adanya orientasi kehidupan yang sangat mapan untuk terus menciptakan ruang-ruang bersama dalam membangun Jayapura. Migran pun kemudian tidak dianggap lagi kelompok yang eksklusif, meskipun di dalamnya terdapat pembatasan-pembatasan yang cukup tegas. Sejalan dengan keberadaan dan keterlibatan migran dalam politik di tingkat lokal, bapak “A” politisi salah satu partai politik, menegaskan:

“...karena kondisi seperti ini di Papua, dengan otsus ini, maka ya kita kemudian tidak serahkan begitu saja, paling tidak dengan adanya kita di dalam itu ikut mewarnai, walaupun pendatang nggak jadi top leadernya paling tidak ada di ring itu, sehingga kita diperhitungkan juga, ada pembelaan juga, dan diperhitungkan masyarakat kita”⁹

Kondisi otonomi khusus Papua seperti yang digambarkan di atas, paling tidak dapat dipahami sebagai bentuk kontribusi migran di satu sisi, dan partisipasi politik di sisi lain. Paling tidak, hal tersebut menunjukkan adanya keinginan migran untuk menjadi

representasi partainya dan konsituen yang diwakilinya, Drs. H. Nurdin Faisal (Politisi GOLKAR), Bachtiar, SE (Politisi PPP), Saharudin (Politisi Partai Buruh), Ahmad Paito, S.Pd.I (Politisi PKS) dan Amir Hamzah (Politisi PKB). Begitu pula kaum migran juga dapat mengantarkan politisi partai Nasional Demokrat, Giri Wijayantoro sebagai wakil bupati Jayapura periode 2018-2023 mendampingi bupati Mathius Awoitauw, SE.,M.Si dalam pemerintahan selama lima tahun.

⁹ Wawancara dengan “A”, hari Selasa Tanggal 18 Juli 2017 di Sentani.

bagian dari masyarakat Kabupaten Jayapura meskipun mendapat penolakan-penolakan.

Keterwakilan migran di eksekutif tercermin dari keberadaan wakil bupati yang berasal dari migran (Jawa). Bagi peneliti, ini merupakan sebuah bentuk keberhasilan sebuah negosiasi bagi migran di tengah tekanan-tekanan politik yang dialami. Demikian pula, keterpilihan beberapa orang yang berasal dari migran menjadi anggota legislatif tidak bisa dilepaskan dari kondisi dan tuntutan atas pentingnya sebuah keterwakilan bagi migran. Migran yang berusaha untuk tetap hadir dalam dinamika politik lokal memiliki tantangan yang berat, namun dihadapi dengan rangkaian upaya termasuk keterlibatan migran secara aktif dalam partai politik. Peristiwa dapat dilihat sebagai pragmatisme migran dalam berpolitik. Mereka menyadari bahwa tidak mungkin bisa menjadi orang nomor satu di Kabupaten Jayapura. Akan tetapi, dengan bersikap fleksibel mereka tetap dapat mengambil keuntungan politik dengan menempatkan wakil mereka sebagai orang kedua di Jayapura. Dengan demikian, keterwakilan migran tetap terjaga meskipun selalu berada di bawah bayang-bayang tekanan politik akibat implementasi otonomi khusus bagi Papua.

Demikian pula dalam relasi politik yang terjadi bersifat kontestatif- afirmatif. Beberapa posisi jabatan di eksekutif dan di legislatif sesungguhnya masih dimungkinkan untuk diperebutkan diantara kedua belah pihak, namun keberpihakan undang-undang otonomi khusus bagi Orang Asli Papua menyebabkan migran sadar diri dan tidak terlalu jauh masuk di wilayah politik. Namun untuk mempertahankan diri kaum migran melakukan strategi dengan intensifikasi ikatan-ikatan solidaritas kedaerahan yang menjadi modal sosial bagi mereka yang sejak lama dipupuk sehingga dalam berbagai konteks politik, kaum migran menjadi kelompok yang selalu diperhitungkan sekaligus juga menjadi penyeimbang diantara kelompok-kelompok dalam kontekstasi politik.